

## DARI PERS PERJUANGAN KE GLOBALISASI: MENJELANG MODAL ASING MASUK INDUSTRI PERS INDONESIA\*

Oleh Ashadi Siregar

( 1 )

Masihkah relevan berbicara tentang pers perjuangan sekarang ini? Untuk itu sosok pers nasional sekarang harus dilihat dengan pandangan kesejarahan, yaitu sebagai lanjutan dari Pers Nasional pada masa kolonial. Jika setting kolonial dipakai untuk membicarakan kehidupan pers, dapat dibedakan 3 tipe, yaitu pers kolonial sebagai pendukung establisme politik, pers komersial yang umumnya dikelola oleh kelompok Cina, dan pers perjuangan yang diterbitkan sebagai bagian Pergerakan Nasional. Pers perjuangan inilah yang disebut sebagai Pers Nasional. Etos kehadirannya dapat dibedakan secara tajam dengan kedua tipe pers lainnya.

Tetapi tidak mungkin membuat taksonomi tipe pers atas dasar perbedaan etos kehadirannya kini. Semua pers yang terbit di Indonesia harus disebut Pers Nasional. Pada saat mengurus Surat Ijin Usaha Penerbitan Pers (SIUPP), seluruh prosedur tentulah dimaksudkan untuk menyaring agar hanya penerbitan pers yang bertolak dari Pancasila diberi lisensi terbit yang sangat berharga itu.

Dalam perkembangannya, pers nasional bergerak ke arah penerbitan yang bersifat industrial. Ini ditandai dengan kemajuan perangkat keras dan pola manajemen yang semakin canggih. Ditambah lagi dengan sifat pengusahaan yang padat modal, sosok pers sekarang sangat berbeda dibanding dengan Pers Nasional pada masa Pergerakan Nasional. Karenanya mungkin kurang tepat men"tracee" pers sekarang dengan Pers Perjuangan atau Nasional tempo "doeloe".

Pers nasional sekarang dan masa depan, boleh saja dipertalikan dengan etos pers perjuangan. Namun mungkin perlu disadari bahwa etos yang menggerakkan jurnalisme saat itu sehingga memunculkan format pers perjuangan, kalau mau dijalankan sekarang, boleh jadi akan melahirkan format yang sangat berbeda. Etos bisa dirumuskan sebagai idealisasi kehidupan, dan idealisasi bisa berbeda dengan dinamika kenyataan empiris. Banyak variabel yang perlu diperhitungkan dalam proses idealisasi ke realitas empiris.

Pertama-tama yang perlu diingat adalah motivasi kemunculan pers perjuangan, yaitu ide politik. Dengan demikian pers merupakan bagian institusi politik. Pers adalah bagian organik dari suatu dinamika sosial yang menjadi institusi bersifat opponen di dalam sistem kolonial saat itu. Dengan motivasi politik yang bersifat opponen, sudah barang tentu posisi dari pengelola dalam membangun etos jurnalismenya akan bersifat khas. Dengan menempatkan pers sebagai alat politik dengan sendirinya membawa konsekuensi terhadap keberadaan para jurnalisnya, yaitu melihatnya sebagai aktivis politik, atau sebaliknya, aktivis politik menjalankan kegiatan jurnalistik. Artinya jurnalis dan aktivis politik merupakan 2 sisi dari mata uang logam.

Kalau mau jujur, pers perjuangan yang sering disebut-sebut itu sebenarnya jurnalisme pamflet politik. Tentunya tidak akan ada yang mengambil posisi seperti itu dalam sistem nasional sekarang. Meneruskan etos perjuangan semacam itu secara mentah sekarang,

---

\* Disampaikan pada pembukaan Program Pelatihan Wartawan Profesional (PPWP) Angkatan VIII, Lembaga Penelitian Pendidikan Penerbitan Yogya (LP3Y), Yogyakarta, 27 Juni 1994

mungkin dapat dilakukan dengan menghadirkan jurnalisme pamflet pembangunan, dengan menjadikan pejabat birokrasi pembangunan sebagai aktor utama dalam pemberitaan media.

Namun perjuangan dapat dilihat secara kontekstual. Karenanya pers perjuangan pun dapat muncul dengan berbagai cara. Di antaranya pers sebagai institusi dalam kehidupan masyarakat, dengan fungsinya yang bersifat imperatif dari konsekuensi interaksinya dengan khalayaknya. Dalam fungsi semacam ini, pers merefleksikan realitas masyarakat, dan untuk pers semacam ini memerlukan perjuangan.

Atau sebaliknya pers sebagai sarana untuk menyampaikan ide-ide luhur, ideologi, bahkan kepentingan spesifik dari pihak yang menguasai pers. Ide luhur dan ideologi dapat yang berkonteks kepada cita-cita kerakyatan, sebaliknya kepentingan dapat berorientasi kepada kekuasaan ekonomi atau politik yang bersifat elitis. Perjuangan semacam ini sama halnya dengan perjuangan melalui bidang politik dan bisnis umumnya.

Karenanya perjuangan boleh disebut sebagai peran imperatif yang melekat pada pers yang menjalankan fungsinya, sesuai dengan garis yang ditentukan oleh "tuan"-nya. Boleh jadi yang menjadi "tuan" ini khalayak pembaca, mungkin ideologi, tapi dapat pula kekuatan kapitalis pemilik media pers, atau kekuasaan negara yang mengendalikan pers dengan regulasi yang bersumber dari hukum sampai teror. Dengan kata lain, setiap pengelola pers akan menjalankan fungsi imperatif sesuai dengan ekspektasi "tuan"-nya. Mungkin "tuan" yang tunggal, mungkin juga "tuan" yang banyak, termasuk di antaranya orientasi profesi atau bahkan orientasi pribadi jurnalis. Kesemua garis dari banyak "tuan" inilah sebagai resultante kelahiran media dan informasi yang sampai kepada masyarakat.

## ( 2 )

Sebutan perjuangan dengan bahasa Angkatan 45 dan sebelum-nya, agaknya lebih khusus, mengacu kepada suatu peran yang bertolak dari semangat nasionalisme dan anti kolonial dari era pra-kemerdekaan. Nasionalisme dari masa pra-kemerdekaan ini mudah dirumuskan, sebab sekaligus mengandung anti kolonial. Namun semangat yang berasal dari masa lampau ini perlu dilihat lebih proporsional sekarang. Bagaimana nasionalisme dan anti kolonial ini harus diinterpretasikan sekarang oleh suatu penduduk yang sudah terikat sebagai satu entitas oleh konstitusi dan kekuatan birokrasi yang kuat menjaganya, sekaligus berada dalam setting mondial? Nasionalisme bukan lagi ideologi yang mengandung anti kolonial, tetapi suatu kenyataan yang dibangun oleh instrumen kekuasaan negara. Sehingga nasionalisme bukan semata-mata pilihan ideologis yang bersifat personal, melainkan realitas empiris yang lebih bersifat struktural. Secara personal, pilihan akan ideologi nasionalisme sama sekali tidak berarti, sebab setiap manusia akan terikat dengan atribut kebangsaan, lepas memiliki isme atau tidak.

Perumusan ulang seperti yang biasa diucapkan setiap Hari Kebangkitan Nasional 20 Mei, rasanya belum pernah mencapai tataran yang memberi kejelasan tentang posisi kita sebagai bangsa suatu negara dalam proses globalisasi sekarang. Globalisasi sering disebut-sebut dalam kaitan dengan nilai dan cara hidup yang terbentuk melalui informasi sehingga menjadi acuan penduduk dunia. Arus informasi global dianggap membentuk masyarakat dunia yang semakin homogen. Tetapi pandangan ini sekaligus bertentangan dengan dinamika politik yang menghasilkan semakin menyempitnya entitas kebangsaan, dengan bermunculannya negara "suku" di berbagai belahan bumi. Di satu pihak penduduk dunia semakin disatukan oleh nilai-nilai dan cara hidup yang sama, tetapi dalam pada itu bertumbuh pula negara "suku" yang semakin sempit dataran kebangsaannya.

Karenanya globalisasi nilai dan cara hidup melalui informasi, boleh dikata tak banyak perannya terhadap perumusan ulang nasionalisme bagi suatu entitas rakyat negara. Kelihatannya, dengan semakin bersifat global dinamika informasi, bukan menjadikan penduduk dunia akan semakin menjadi suatu entitas bumi. Sebaliknya yang terjadi adalah proses bersifat ke arah dalam (in-ward), untuk mencari nilai lokal dan identitas yang bersifat indigenus. Contoh soal dari kawasan bekas Uni Soviet dan negara-negara satelitnya agaknya boleh dipakai. Dengan arus nilai dan informasi yang didukung oleh mekanisme politik yang monolitik, "kebangsaan" entitas besar suatu blok belahan dunia dan negara-negara, ternyata hanya terbentuk semu. Pada saat mekanisme politik ambruk, seluruh nilai yang dibangun tidak dapat menyangga entitas blok, bahkan negara-negara yang berada dalam blok. Dalam "satu malam", seluruh entitas blok dan negara-negara telah bubar. Nilai dan ideologi nasionalisme yang disangga mekanisme politik ternyata tidak dapat menjaga suatu entitas "kebangsaan".

Lalu apa yang harus dirisaukan dari globalisasi nilai? Tidak ada yang dapat memastikan bahwa nilai lokal dan indigenus akan hilang. Begitu juga tidak ada yang dapat menyebutkan seberapa kuat keterikatan suatu entitas negara ke dalam sistem politik mondial (kalau ada). Bahkan semakin kuat arus global yang berasal dari pusat dunia, semakin kuat pula daya resistensi untuk mempertahankan keberadaan entitas perifer.

Dengan kerangka yang sama kenyataan ini juga berlaku dalam lingkup domestik suatu negara. Semakin kuat arus pengendalian dari "pusat", akan bertumbuh resistensi entitas lokal. Kericuhan-kericuhan dalam pemilihan kepala daerah di berbagai provinsi dan kabupaten di Indonesia, boleh dijadikan pertanda. Dalam perjalanan pemerintahan Orde Baru proses otonomi daerah dan desentralisasi tidak semakin mewujudkan, bahkan sebaliknya. Dengan pengendalian melalui informasi dan mekanisme politik dari pusat yang semakin keras, akan semakin menumbuhkan nilai dan kesadaran identitas periferi.

Dari sini dapat direnungkan, bahwa arus globalisasi mondial maupun negara yang berasal dari informasi dan mekanisme politik, tidak punya arti banyak untuk membicarakan nasionalisme. Karena ada arus besar yang jauh lebih penting diperhatikan dalam merumuskan ulang nasionalisme, yaitu globalisasi ekonomi. Kenyataan sesungguhnya adalah yang berasal dari dinamika modal, ditandai dengan interaksi yang bersifat empiris dari berbagai institusi yang digerakkan oleh mekanisme ekonomi. Mitos kesejarahan, nilai dan cara hidup yang disangga oleh mekanisme politik, mungkin dan dapat saja ditinggalkan, sebab seluruh interaksi yang berlangsung dari sini sebenarnya semu. Dalam metafora lain, interaksi semacam ini hanyalah "realitas lunak" (soft reality). Sementara "realitas keras" (hard reality) adalah interaksi yang berasal dari nilai dan cara hidup yang digerakkan oleh mekanisme ekonomi.

Untuk itu kita perlu mengenali dua macam informasi yang penting, yaitu pertama informasi sosial yang terbuka dan disampaikan melalui media massa. Dan kedua, informasi data keuangan yang berlangsung dalam interaksi berbagai institusi keuangan. Dinamika globalisasi informasi terbuka dan massal, sama sekali berbeda dengan dinamika globalisasi modal. Melalui hardware-nya, informasi sosial yang disampaikan terbuka, dapat diidentifikasi. Karena itu biasanya penguasa negara merasa dapat mengendalikan dan merekayasa rakyatnya melalui informasi sosial dengan treatment terhadap media massa dan wartawan. Sementara dinamika modal mewujudkan sebagai data melalui hardware pendukung sistem moneter global, dan penguasa suatu negara tidak akan dapat mengendalikannya. Seorang semacam Eddy Tansil dapat memindahkan dana deposito ratusan milyar rupiah hanya dalam hitungan menit, ke bank di pulau negara antah berantah. Tadinya kekuasaan negara dapat memasuki domain pribadi dengan menanyakan jumlah uang yang dibawa seorang pendatang asing misalnya, tetapi kini sudah tidak mungkin lagi

dengan adanya sistem kartu kredit yang menjadi bagian dalam sistem ekonomi global (seterusnya disebut SEG).

Artinya sistem data keuangan yang menyangga arus dana melalui berbagai institusi keuangan, sama sekali tidak dapat diidentifikasi oleh birokrasi negara betapa pun besar kekuasaan politiknya. Dengan begitu, kerasnya penerapan kekuasaan politik terhadap rakyat sehingga dapat mengendalikan realitas sosial, pada dasarnya hanya bersifat semu. Sebab realitas dinamika ekonomi yang sudah menjadi bagian dari informasi keuangan global, tidak dapat dikuasai birokrasi negara. Kecuali share kekayaan negara memang besar dan nyata dari seluruh dana yang berada dalam SEG. Melalui pengendalian kekayaannya, negara dapat menjadi faktor dalam SEG. Tetapi jika kekayaan negara hanya dibuat sendiri oleh penguasa negara (dalam anggaran dan pencetakan uang), sehingga tidak bernilai sebagai share dalam dana SEG, maka kekayaan itu pun sebenarnya semu, bahkan hanya menghasilkan inflasi.

( 3 )

Dalam melihat keberadaan negara sekarang mau tidak mau menggunakan dua kriteria, politik dan ekonomi. Dari sisi politik, kita boleh menilai daya yang terdapat secara domestik untuk memelihara entitas kebangsaan dalam negara baik yang berupa arus pusat, maupun keterikatan periferi (dalam hal ini daerah) untuk tetap berada dalam entitas kebangsaan. Realitas lunak ini harus disandingkan dengan realitas keras, yaitu kekayaan negara dalam konstelasi dana SEG. Tentunya pakar ekonomi moneter dapat menjawab seberapa besar ratio kekayaan suatu negara dibanding dengan dana total dalam SEG, untuk dapat disebut sebagai entitas negara yang kuat. Artinya berapa besar kekayaan negara agar entitas tidak mengalami kebangkrutan ekonomi. Proses pengendalian politik yang keras dari pusat terhadap periferi dan rakyat, dapat menghadapi arus balik manakala kekuasaan politik ambruk akibat kebangkrutan ekonomi negara.

Dengan pandangan struktural tentang makna nasionalisme di atas, dapat dilanjutkan dengan nilai nasionalisme secara mikro. Melihat nasionalisme dalam nilai dan cara hidup pribadi, mungkin hanya menjadi pembicaraan pada masa lalu. Nasionalisme akan lebih berbicara jika ditempatkan dalam domain ekonomi. Manakala Salim atau Aburizal Bakrie berinvestasi ke Vietnam, apakah dana investasinya berasal dari share negara RI dalam sistem ekonomi global? Kalau ya, rakyat perlu tahu, sebab menjadi urusan dia dan rakyat Indonesia. Kalau dana yang digunakan berasal langsung dari institusi keuangan yang berada dalam SEG, itu bukan urusan rakyat Indonesia, itu urusan dia dan dunia.

Dengan demikian asal muasal modal dapat dan perlu dipersoalkan dalam kaitan dengan share negara dan SEG. Pengusaha yang hanya berkutatan dengan dana domestik hanya ada pada masa sebelum tatanan SEG. Dana dalam bisnis modern sudah menjadi bagian ekonomi global, karenanya setiap dana investasi sedapat mungkin akan "diambil" dari sistem global tersebut. Kalau ada pengusaha berkebangsaan Indonesia dapat menggunakan dana yang berasal dari SEG untuk berinvestasi di dalam negeri, apakah kadar nasionalismenya lebih tinggi dibandingkan jika ia melakukan investasi di luar negeri? Ini pertanyaan terbuka dalam dataran sistem ekonomi global.

Sebaliknya penggunaan dana yang merupakan share negara di dalam SEG, untuk keperluan produksi barang-barang yang tidak menyumbang kembali kepada share tersebut, dapat menjadi faktor dalam kebangkrutan negara. Sebagai ilustrasi, penggunaan devisa dalam memproduksi pesawat terbang yang produknya hanya dibeli oleh pemerintah, dapat menghemat karena tidak perlu membeli barang jadi ke luar, tetapi tidak menyumbang

kepada share negara dalam SEG. Pengusaha swasta domestik yang menggunakan dana negara untuk kemudian ditransfer ke bank luar negeri, telah menjadi faktor penyusutan share negara dalam SEG, karena ikut dalam kebangkrutan negara. Sementara pengusaha swasta domestik yang dapat menggunakan dana berasal dari SEG untuk berinvestasi di dalam negeri, harus kita sebut patriotik dan nasionalis.

Demikianlah, melihat seolah-olah ada modal asli dan ada modal asing, sungguh terlalu absurd pada era global ini. Yang ada hanyalah pengusaha berkewarganegaraan Indonesia dan pengusaha berkewarganegaraan asing, yang memiliki tingkat kredibilitas tertentu dalam memanfaatkan dana SEG. Kita punya oknum semacam Eddy Tansil dengan "kredibilitas" tinggi setara tril-yunan bagi Bapindo dan sindikasi perbankan pemerintah kita. Jago kandang yang dielus-elus pemerintah ini tentulah berbeda dengan pengusaha lain yang memiliki kredibilitas terhadap SEG global sehingga dapat berinvestasi di luar negeri. Mana yang lebih memiliki nasionalisme?

Sudah saatnya kita melihat nasionalisme dalam perspektif baru, dengan menempatkannya pada satu pihak dalam skala ekonomi global, dan pada lain pihak skala ekonomi domestik. Agaknya kita perlu membuang emosi nasionalisme lama manakala berhadapan dengan mekanisme ekonomi global. Kalau mau memiliki ideologi adalah dalam konteks kehidupan domestik, mungkin dapat menggunakan dataran politik. Tetapi nasionalisme semacam itu hanya semu, sebab realitas ekonomi dapat lebih berperan dalam menentukan keutuhan entitas negara.

Dalam dataran ekonomi, kita dapat memilah dengan tajam, antara entitas ekonomi dunia dan entitas ekonomi rakyat domestik. Dengan begitu nasionalisme dalam konteks ekonomi dapat ditempatkan lebih proporsional. Ke luar dalam menghadapi SEG, perlu dipertanyakan, besaran share negara RI dalam SEG tersebut, dan bagaimana kebijakan dalam mengelola share tersebut. Jika itu dianggap hanya urusan pejabat negara, bukan urusan rakyat, tidak perlu dimasukkan sebagai masalah nasionalisme. Anggap saja kejayaan dan kebangkrutan negara RI sebagai urusan para pejabat negara. Keberadaan entitas RI dalam konstelasi dunia bukan masalah ideologi, tetapi masalah realitas tentang kekayaan dan kebangkrutan negara (bukan pribadi).

Sebaliknya nasionalisme dalam konteks ekonomi domestik perlu dilihat ke dalam kehidupan rakyat. Setiap kali sampai kepada pembicaraan tentang hajat hidup rakyat dan kemakmuran sebesar-besarnya, kita sudah memasuki pilihan ideologis. Disini sebenarnya penerapan nasionalisme itu diuji.

Dengan demikian nasionalisme yang dihadapkan dengan kenyataan dalam skala sistem ekonomi global, tidak relevan dilihat dalam perspektif ideologis. Ideologi tidak dapat menjawab masalah yang berasal dari realitas keras modal baik domestik maupun dalam SEG. Ideologi hanya berarti saat membicarakan rakyat. Pilihan-pilihan kebijakan yang berkaitan dengan kehidupan rakyat, barulah relevan menggunakan perspektif ideologi. Kata kunci disini adalah realitas keras (ekonomi), bukan realitas lunak (politik), yang dapat memelihara rakyat agar tetap merasa berada dalam suatu entitas kebangsaan.

( 4 )

Sekarang berkembang pandangan kontroversial terhadap Peraturan Pemerintah (PP) no. 20/1994, karena di dalamnya tercantum bahwa usaha media massa termasuk di antara bidang yang dapat dimasuki oleh penanaman modal asing. Berbagai pihak tersentak, ada yang karena teringat kepada azas ekonomi kerakyatan yang mengutamakan jaminan terhadap hajat hidup rakyat dan kemakmuran sebesar-besarnya, sampai keprihatinan akan

nasib modal domestik. Tetapi khusus dengan bidang media massa, agaknya acuan nasionalisme lama lebih banyak berbicara. Mempertalikan dengan hajat hidup rakyat tentulah tidak relevan. Siapa yang bisa menjelaskan dengan hukum ekonomi, bahwa media massa menyangkut hajat hidup rakyat banyak? Kalau dibredel tentulah rakyat akan terganggu kehidupan primernya.

Sementara masalah yang lebih mendasar tak pernah dibincangkan, bagaimana seharusnya kita menyikapi modal asing? Dengan kata lain, apa makna modal asing bagi ekonomi domestik kita. Sebaliknya perbincangan ini sama halnya dengan apa makna modal domestik yang diinvestasikan ke luar negeri. Selama ini masalah investasi dan bidang-bidang yang dimasuki oleh modal asing hanya menjadi urusan teknokrat ekonomi yang berada dalam birokrasi negara. Kalau sekarang bergulir ke masyarakat, hanya karena pers mengeksposnya, hanya karena berkaitan dirinya.

Adapun alasan penolakan modal asing masuk ke perusahaan media massa bertolak dari pasal yang termuat dalam Undang-undang Pers. Tetapi alasan yang mendasari adanya pasal tersebut sebenarnya tidak jelas. Bahaya modal atau dana asing yang berasal dari Undang-undang No. 11 tahun 1966, sebagaimana berbagai pasal dalam undang-undang tersebut, pada dasarnya membawa inertia dari era Orde Lama. Pasal-pasal yang berkaitan adalah:

#### Pasal 13

(2) Modal Perusahaan Pers harus seluruhnya modal nasional, sedang pendiri-pendiri dan pengurusnya harus seluruhnya warganegara Indonesia.

(3) Perusahaan Pers dilarang memberikan atau menerima jasa bantuan/sumbangan kepada dari pihak asing, kecuali dengan persetujuan Pemerintah setelah mendengar Dewan Pers.

Sebutan modal nasional dalam globalisasi ekonomi sekarang tentulah kehilangan makna. Perihal kewarganegaraan pendiri dan pengurus perusahaan pers memang tidak sulit diartikan. Tetapi yang lebih penting, bahwa tidak pernah ada diskusi terutama di kalangan pers yang membahas, sejauh mana sebenarnya pengaruh modal baik domestik maupun asing terhadap orientasi jurnalisme yang akan membawa konsekuensi terhadap isi pers Indonesia.

Di luar itu semua, sayangnya kita belum punya pengusaha media sekelas Rupert Murdoch yang dapat memanfaatkan dana SEG sehingga dapat melakukan investasi di antero dunia. Pengusaha media kita boleh disebut sebagai pewarung yang mengumpulkan sen demi sen dananya sendiri, dan hanya dapat berusaha di dalam negeri. Mungkin sudah ada di antaranya yang dapat memanfaatkan dana investasi dari perbankan. Tetapi umumnya adalah dengan akumulasi keuntungan dari putaran cash-flow perusahaan. Jangankan perbankan global, perbankan domestik pun tidak sepenuhnya dapat menerima kredibilitas pengusaha media domestik kita. Pengusaha media sekelas Jakob Oetama mungkin akan lebih mudah mencari dana investasi untuk bisnis perhotelan, ketimbang untuk penerbitan pers. Semua bankir tahu, betapa media sebesar TEMPO dengan profit relatif tinggi untuk bisnis pers di Indonesia, dikarenakan 1 edisi atau bahkan 1 item reportase, dapat mati.

Kekuasaan negara yang menutup usaha penerbitan pers, telah menghancurkan seluruh upaya domestik dengan tenaga anak bangsa sendiri, yang telah membangun modal selama bertahun-tahun. Bisnis pers jauh lebih sulit dalam mendapatkan dana investasi dari perbankan, dan juga dalam mengembangkan modal. Jangka waktu untuk mencapai titik-

impas sulit diproyeksikan, dan besaran margin profit pada dasarnya kecil, tidak sebanding dengan bisnis lain, semacam bisnis jalan tol, atau pabrik mi instan. Selain itu, kematian perusahaan secara politik semacam pembredelan sama sekali tidak dikenal dalam bahasa ekonomi. "Force majeure" semacam perang, malapetaka alam dan semacamnya, dapat dipahami dalam dunia investasi. Tetapi tekanan politik sampai pada tingkat mematikan bisnis, agaknya hanya terjadi dalam bidang pers di Indonesia

Kita masih berkutat memersoalkan "nasionalisme" dalam modal media massa. Padahal modal, entah berasal dari dalam negeri atau luar negeri, pada dasarnya netral; sementara yang dapat mendikte, memaksa, menekan, mengendalikan bahkan merekayasa manusia adalah manusia itu adanya. Karenanya kalau pun mau menilai, kita boleh membuat pertanyaan spekulatif tentang kecenderungan pemilik modal (sebutan sederhana dari pengusaha yang memiliki kredibilitas untuk memperoleh dana investasi dari sistem ekonomi domestik atau global). Kita akan mengenal pemilik modal berkewarganegaraan Indonesia; dan pemilik modal berkewarganegaraan asing. Masing-masing mungkin akan menggunakan dana investasi milik sendiri, kredit dari sistem ekonomi domestik negaranya, atau dari sistem ekonomi global.

Dari manapun asal dana investasi itu, akan berpulang kepada pribadi pengusaha yang bersangkutan, sejauh mana ia akan mencampuri orientasi jurnalisme medianya. Tidak ada jaminan bahwa pengusaha Indonesia akan lebih tebal penghayatan nilai demokrasi dan penghargaan kepada hak azasi dibanding dengan pengusaha asing. Tidak ada jaminan bahwa pengusaha Indonesia akan memisahkan kepentingan bisnis lainnya dari orientasi jurnalisme media yang dimodalinya. Sebagaimana juga tidak ada kepastian bahwa pengusaha asing akan mempengaruhi politik keredaksian suatu media massa. Yang jelas, pengusaha manapun, akan mempertanyakan profit dari rangkaian cash-flow perusahaannya.

Sebaliknya, siapapun pemilik modal, akan bertemu dengan etos dan orientasi profesi yang dianut oleh kaum profesional yang menjalankan media. Yang dihadapi oleh kaum jurnalis bukan modal, tetapi pemodal. Dengan demikian seluruh etos dan orientasi profesi akan selamanya diuji oleh berbagai tekanan, mulai dari pemodal (kekuasaan ekonomi) sampai penguasa (kekuasaan negara).

( 5 )

Perubahan masyarakat menuntut kaum profesional dalam media pers niscaya tidak lagi sekadar mempertanyakan etos keberadaannya yang mengacu kepada mitos-mitos perjuangan, sebab harus mencari celah untuk dapat hidup dan berkembang dalam perebutan pasar. Jelas kompetisi antar media berlangsung kian keras. Bukan hanya antar media cetak sejenis (suratkabar harian dengan suratkabar harian), tetapi persaingan merebut perhatian khalayak yang uang dan waktunya digunakan untuk media lainnya.

Sekarang dan di masa depan, titik tolak dalam menerbitkan media pers adalah modal. Realitas empiris menuntut begitu, dan juga ketentuan untuk mendapat lisensi usaha penerbitan pers menyebutkan modal sebagai persyaratan utama. Bukan personel jurnalistik sebagai sumberdaya yang menjadi persyaratan untuk memulai usaha penerbitan pers. Karenanya etos perjuangan hanya dijadikan acuan pribadi, sebab tidak menjadi dasar dalam sistem manajemen organisasi pers. Sebagai ilustrasi, sampai saat ini belum pernah ada perbincangan tentang manajemen pers dan permodalan dalam kerangka Pers Pancasila. Pers Pancasila selalu dikaitkan dengan isi media pers yang bersesuaian dengan ideologi pembangunan.

Dalam kecenderungan permodalan, tentulah komponen keredaksian perlu meningkatkan profesionalisme yang pas dengan sistem yang ada. Kalau tidak mau digilas, maka tidak terelakkan untuk menjadi "jurnalis plus", yaitu yang memiliki keterampilan teknis yang standar dalam jurnalisme, juga memiliki wawasan untuk menempatkan jurnalisme tersebut dalam setting manajemen.

Dengan demikian politik keredaksian yang menjadi dasar bagi kegiatan yang berkaitan dengan muatan produk, menjadi lebih complicated. Tidak mungkin lagi media pers diproduksi hanya dengan mitos dan ideologi. Setiap pengelola perlu merumuskan formula dan bauran keredaksian (editorial mix), sebelum berproduksi. Dengan rumusan inilah strategi pemasaran yang bersifat menyeluruh dapat dikembangkan. Jika kaum jurnalis siap dengan titik tolak semacam ini, dapat disebut bahwa komponen keredaksian yang menjalankan jurnalisme setidaknya dapat menjadi bagian esensial dalam sistem manajemen.

Pilihan dalam hubungan idealisme dan ekspektasi menjadi dasar politik keredaksian dalam pengwujudan produk media. Kejelasan akan orientasi media akan dicapai melalui rumusan yang jelas akan politik keredaksian, dan dari sinilah sebenarnya bertolak seluruh dinamik penerbitan. Maka posisi jurnalisme sebagai primadona akan digantikan oleh manajemen keredaksian (editorial management) yang menjadi subsistem dalam sistem manajemen penerbitan. Bahasa manajemen diterapkan dalam kegiatan keredaksian, ini tentunya bukan berarti mengurangi makna jurnalisme, tetapi menuntut wartawan pun perlu merumuskan setiap langkah kerja dalam seluruh sistem media.

Jurnalisme dapat "ditelan" oleh manajemen dan permodalan jika para wartawan tidak menempatkan secara proporsional komponen keredaksian sebagai sub-sistem dalam sistem keseluruhan. Atau ketegangan antara wartawan dan manajemen, jika wartawan masih tetap bermimpi jurnalisme sebagai primadona dunia penerbitan. Dengan demikian tantangan profesionalisme wartawan di masa depan bukan hanya mengembangkan teknik jurnalisme pada tingkat bagaimana (how) untuk menformat realitas menjadi informasi, tetapi lebih jauh menempatkan outputnya dalam keseluruhan sistem manajemen penerbitan pers.

Pers nasional di masa depan bukan hanya menghadapi tantangan di dalam dirinya sendiri, tetapi lebih-lebih lagi perkembangan masyarakat Indonesia. Dengan demikian wartawan akan menghadapi berbagai arus besar yang berlangsung. Bukan hanya ekspektasi khalayak yang semakin tinggi dalam menuntut keragaman dan kualitas informasi, tetapi juga pers yang sudah menjadi bisnis industrial.

Realitas keras sudah memasukkan media massa ke dalam mekanisme ekonomi, bagaimana kita masih dapat mengkarantinakan bidang ini dari sistem ekonomi global? Di berbagai antero dunia, sistem ekonomi global telah memasukkan ekonomi industri media ke dalamnya. Menahan ekonomi global dengan mekanisme politik, sama saja dengan membendung angin dengan jaring. Kita hanya ingin tahu seberapa besar kekayaan negara yang aktual ambil bagian dalam sistem ekonomi global. Karenanya kalau memang sudah tidak realistis, lebih baik Undang-undang Pers disempurnakan, dengan memasukkan ketentuan-ketentuan dengan logika ekonomi di dalamnya. Konsep SIUPP pun sepenuhnya dapat dikembalikan kepada logika sebagai badan ekonomi. Dengan demikian seluruh mekanisme bisnis yang mendasari keberadaan pers, tidak lagi di bawah pengaturan Departemen Penerangan yang lebih bersifat pengendalian politik, tetapi di bawah pengaturan perangkat negara yang mengawasi bisnis dan hukum.

Dari sini kaum profesional jurnalisme perlu pula merumuskan etika dalam perspektif baru. Etika profesi yang secara eksplisit memberi acuan bukan hanya menyangkut hubungan



jurnalis sesamanya (kolegialitas), dan hubungan dengan masyarakat (tanggungjawab sosial), tetapi juga hubungan dengan kekuasaan negara, pemodal media, dan kekuatan bisnis umumnya sebagai cerminan otonomi dan kemandirian profesi jurnanisme. Perspektif etika perlu menjawab permasalahan aktual dalam keberadaan profesi.

Dengan demikian, permasalahan kaum profesional adalah menempa pribadi untuk dapat menempatkan diri secara tepat dalam menghadapi khalayak, pemodal media, kekuasaan ekonomi, dan kekuasaan negara. Sejak dini kaum profesional perlu menyadari panggilan profesi, sehingga tidak menjadi antek manakala terjadi kolusi antara pemodal media, kekuasaan ekonomi, dan kekuasaan negara. Sebab posisinya tetaplah sebagai kaum profesional yang menjalankan fungsi institusi masyarakat, bukan untuk kepentingan pemodal media, apalagi kekuasaan ekonomi dan negara. Pemodal media sendiri pun sesungguhnya memerlukan medianya menjadi institusi masyarakat, sebab hanya dengan fungsi tersebut modalnya dapat berkembang. Dengan menjadikan media hanya sebagai bagian organik dari kepentingan bisnisnya, dengan sendirinya akan tetap tergantung kepada dana operasional dari bisnis lainnya. Tentulah pengusaha sejati tidak menyukai hal ini.